

believe.

Kode anti korupsi

BELIEVE Group

Pendahuluan

Misi Believe Group (selanjutnya disebut "**Believe**") adalah untuk melayani dan mendukung perkembangan semua artis dan label di semua tahap karier mereka.

Guna menjalankan misi ini dan agar terus berkembang, Believe ingin menyusun aktivitasnya berdasarkan empat nilai utama yang harus dimiliki oleh semua karyawan dan mitra Believe dan yang harus diteladani oleh Believe: keahlian, rasa hormat, transparansi, dan keadilan.

Integritas dan perjuangan melawan korupsi atau perdagangan pengaruh adalah prinsip dasar bagi Believe, yang secara khusus menanggapi nilai-nilai transparansi dan keadilan yang dipegang teguh. Melakukan tindakan korupsi atau perdagangan pengaruh adalah tindakan serius yang dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan keuangan yang sangat merugikan bagi Believe serta Karyawannya, tetapi juga bagi kliennya, dan yang dapat merusak reputasi Believe secara permanen.

Oleh karena itu, Believe berjanji untuk melarang dan menghukum setiap perilaku yang tidak pantas dari direktur, karyawan, karyawan eksternal dan harian kasual seperti peserta pelatihan, staf sementara, dan konsultan dari semua perusahaan milik Believe, di Prancis dan di luar negeri (selanjutnya disebut "**Karyawan**").

Untuk alasan ini, Manajemen Believe telah memutuskan untuk merancang Kode Anti Korupsi, yang merupakan bagian dari Kode Etik Believe, dan secara lebih umum Program Kepatuhan Believe, termasuk pemantauan pelatihan anti korupsi wajib.

Saya percaya bahwa Anda akan membaca dengan cermat, kemudian menerapkan dan menegakkan Kode Anti Korupsi ini dalam aktivitas sehari-hari Anda untuk mempromosikan nilai-nilai Believe dan komitmennya terhadap anti korupsi.

Denis Ladegaillerie

Presiden Direktur Jenderal Believe

KATA PENGANTAR

Jangkauan Kode Anti Korupsi

Kode Anti Korupsi ini merupakan bagian integral dari peraturan internal Believe (selanjutnya disebut “**Peraturan Internal**”). Kode ini tersedia setiap saat di Believe Insider dan dalam Aturan Internal dan/atau diberikan kepada Karyawan pada saat menjalankan tugasnya.

Kode Anti Korupsi ini berlaku untuk semua Karyawan, apa pun fungsinya. Semua karyawan harus mematuhi semua kewajiban yang ditetapkan di dalamnya, di bawah sanksi.

Karyawan juga harus memastikan bahwa:

- ketika memilih produser, artis, distributor, pemasok, pelanggan, penyedia layanan, perantara, dan, umumnya, semua rekan kontraktor Believe (selanjutnya disebut “**Mitra Bisnis**”), mereka mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Kode Anti Korupsi ini;
- bahwa semua kontrak dengan Mitra Bisnis memuat ketentuan anti korupsi.

Kode Anti Korupsi ini tidak menyeluruh dan tidak dimaksudkan untuk mencakup semua situasi yang mungkin dihadapi Karyawan.

Kode ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus mengatur keputusan mereka. Setiap orang dapat membacanya dengan cermat untuk menerapkan aturan dan untuk melakukan penilaian dan akal sehat dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul.

Jika ada keraguan atau pertanyaan, Karyawan diminta untuk menghubungi manajer lini mereka, Pejabat Kepatuhan atau Kepala Bagian Hukum untuk meminta pendapat mereka tentang perilaku yang akan diterapkan.

Semua Karyawan harus melakukan semua aktivitas mereka dengan integritas dan etika, terlepas dari praktik dan kebiasaan setempat, dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan negara tempat mereka tinggal, serta undang-undang anti korupsi dan anti pencucian uang di negara tempat Believe beroperasi.

1. LARANGAN KORUPSI DAN PERDAGANGAN PENGARUH

1.1. Pengertian tindak pidana korupsi dan perdagangan pengaruh

1.1.1. Tindakan pidana korupsi

Sebagaimana ditunjukkan dalam Kata Pengantar di atas, tindak pidana korupsi diatur dan dihukum di seluruh dunia, terutama oleh Pasal 432-11, 433-1, 435-1, 435-3, 445-1, dan 445-2 dari KUHP Prancis.

Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai tindakan ketika seseorang yang dipekerjakan dalam fungsi tertentu, publik atau pribadi, meminta/mengusulkan atau menyetujui hadiah, penawaran atau janji, untuk melakukan, menunda, atau menghilangkan guna melakukan suatu tindakan, yang secara langsung atau secara tidak langsung merupakan bagian dari tugasnya.

Korupsi dikatakan publik ketika melibatkan orang yang melakukan pelayanan publik (selanjutnya disebut “**Pejabat Publik**”). Konsep Pejabat Publik harus ditafsirkan secara luas dan mengacu pada setiap orang

yang merupakan penjaga otoritas publik, dipercayakan dengan misi pelayanan publik atau dipercayakan dengan jabatan publik terpilih. Setiap orang lain yang dianggap demikian menurut hukum nasional suatu negara tempat Believe beroperasi juga harus diklasifikasikan sebagai Pejabat Publik.

Korupsi bersifat pribadi jika menyangkut orang atau badan hukum yang bekerja di sektor swasta.

Tindak pidana korupsi hanya didasari dengan janji keuntungan yang tidak semestinya, bahkan jika keuntungan ini pada akhirnya tidak diberikan.

Tindak pidana korupsi aktif (memberikan keuntungan yang tidak semestinya pada seseorang) dan korupsi pasif (menerima keuntungan yang tidak semestinya) dikenai sanksi pidana.

Dalam praktiknya, perilaku berikut dapat digambarkan sebagai korupsi:

- *memberikan keuntungan apa pun (hadiah, voucher hadiah atau diskon, dll.) kepada orang yang bertanggung jawab atas penyiaran di platform musik untuk meningkatkan distribusi judul yang didistribusikan oleh Believe;*
- *memilih penyedia layanan yang tidak memberikan penawaran yang paling menguntungkan untuk Believe guna memperoleh keuntungan pribadi sebagai imbalannya;*
- *menerima hadiah atau keuntungan apa pun dari produser atau penyedia layanan Believe mana pun sebagai imbalan atas pemilihan artisnya atau pengakhiran kontrak baru;*
- *menawarkan perjalanan ke produser sehingga ia menyarankan artis agar memilih Believe daripada penyedia layanan lain;*
- *memberikan keuntungan kepada karyawan perusahaan pesaing untuk memperoleh informasi rahasia tentang posisi pesaing;*
- *memberikan tunjangan (magang untuk kerabat atau undangan ke acara, dll.) kepada pejabat publik untuk menghindari pembayaran denda atau memperoleh keputusan yang menguntungkan.*

1.1.2. Tindakan pidana perdagangan pengaruh

Tindak pidana perdagangan pengaruh terutama diatur oleh Pasal 432-11, 433-2, 435-2, dan 435-4 dari KUHP Prancis.

Perdagangan pengaruh didefinisikan sebagai menawarkan, meminta, menerima, atau menyerahkan keuntungan apa pun kepada seseorang sehingga ia menyalahgunakan pengaruhnya yang sebenarnya atau yang seharusnya untuk memperoleh dari otoritas publik atau kehormatan administrasi, pekerjaan, kontrak, atau keputusan lainnya yang menguntungkan.

Perdagangan pengaruh melibatkan tiga pihak:

- orang yang memberikan keuntungan atau hadiah;
- orang yang menggunakan pengaruh yang dimilikinya sebagai akibat dari kedudukannya;
- orang yang memegang kekuasaan pengambilan keputusan (otoritas atau administrasi publik, hakim, dll.).

Tindak pidana perdagangan pengaruh aktif dan pasif dikenai sanksi oleh KUHP Prancis.

Dalam praktiknya, khususnya perilaku berikut, cenderung digambarkan sebagai perdagangan pengaruh:

- *menawarkan hadiah kepada kerabat Pejabat Publik untuk menggunakan pengaruhnya untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan;*
- *memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga Pejabat Publik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkannya atau untuk membebaskannya dari sanksi terhadap Believe;*
- *mempekerjakan Pejabat Publik sebagai konsultan untuk membantu Believe dalam memperoleh keputusan administratif yang menguntungkan.*

1.2. Sanksi pidana untuk korupsi dan perdagangan pengaruh

Tindakan korupsi atau perdagangan pengaruh dapat mengakibatkan berbagai sanksi hingga dan termasuk denda yang sangat besar serta hukuman penjara untuk Believe dan/atau untuk karyawan yang terlibat, baik di Prancis maupun di luar negeri.

Misalnya, di Prancis, sanksinya adalah sebagai berikut:

- untuk orang perseorangan yang ikut serta sebagai pelaku utama atau pelaku pembantu dalam tindak pidana korupsi: 5 sampai 10 tahun penjara dan denda 500.000 sampai 1.000.000 euro atau setara dengan dua kali lipat hasil pelanggaran;
- untuk badan hukum: 2.500.000 hingga 5.000.000 euro atau setara dengan dua kali lipat hasil pelanggaran, serta hukuman tambahan.

Misalnya, pengadilan yang berlokasi di luar negeri dapat mengenakan pembayaran denda yang setara dengan jumlah atau nilai keuntungan apa pun yang diterima kepada siapa pun yang menerima segala bentuk keuntungan yang melanggar hukum selain sanksi pidana.

1.3. Larangan korupsi dan perdagangan pengaruh di dalam Believe

Perilaku yang dapat diklasifikasikan sebagai korupsi dan perdagangan pengaruh sebelum transaksi diselesaikan, selama, dan juga setelah pelaksanaannya, dilarang keras di dalam Believe. Karyawan berjanji untuk mematuhi semua undang-undang anti korupsi dan semua aturan yang ditetapkan dalam Kode Anti Korupsi ini.

2. ATURAN YANG HARUS DIKUTI DAN PERILAKU YANG DILARANG

2.1. Hadiah dan undangan

Meskipun menawarkan hadiah atau undangan bernilai rendah dapat dianggap sebagai tindakan sopan santun di negara tertentu, tindakan tersebut dapat menyebabkan kebingungan dan dianggap sebagai pelanggaran. Inilah sebabnya mengapa kita perlu waspada.

Bahkan, dilarang keras untuk menawarkan hadiah atau keuntungan atau mengundang seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau untuk secara tidak adil menggunakan pengaruh apa pun atas tindakannya atau tindakan pihak ketiga.

Oleh karena itu, dalam hal apa pun, dilarang keras untuk:

- membayar atau menawarkan untuk membayar sejumlah uang kepada Pejabat Publik atau Mitra Bisnis Believe atau menerima sejumlah uang dari Mitra Bisnis;
- memberikan jaminan nilai atau menawarkan pinjaman yang disamarkan sebagai hasutan atau penggantian kepada orang yang ikut serta atau tidak ikut serta dalam segala bentuk urusan atau transaksi;
- menawarkan hadiah atau undangan kepada Pejabat Publik;
- menawarkan hadiah atau undangan kepada seseorang untuk memperoleh pertimbangan, atau untuk memengaruhi keputusannya atau keputusan pihak ketiga (kontrak atas nama Believe, penyebaran judul yang didistribusikan oleh Believe, dll.) dengan cara yang tidak semestinya;
- meminta atau menerima pembayaran hadiah atau undangan sebagai pertimbangan, imbalan, atau motivasi untuk memberikan kontrak atau memilih Mitra Bisnis Believe;
- menawarkan atau menerima hadiah atau undangan selama fase tender atau selama negosiasi kontrak.

Namun, sesuai dengan hal di atas, hadiah dan undangan tertentu dapat ditawarkan atau diterima, selama nilai kesopanan tersebut tidak melebihi batas praktik yang dapat diterima secara sosial dan tetap dalam batas jumlah tahunan maksimum 200 euro (atau yang setara dalam mata uang asing) per Karyawan. Ambang batas ini dapat diturunkan di negara-negara tertentu untuk mempertimbangkan kebiasaan setempat. Dalam hal apa pun, Karyawan tidak boleh menawarkan lebih dari nilai yang diizinkan untuk diterima atau ditawarkan oleh penerima manfaat kepada Karyawan.

Dalam semua kasus, Karyawan harus menyimpan dokumen pendukung yang tertulis dan akurat untuk hadiah dan undangan yang mereka tawarkan dan terima.

Jika ada keraguan atau pertanyaan mengenai hadiah dan undangan, Karyawan diminta untuk memberi tahu Pejabat Kepatuhan atau Kepala Bagian Hukum.

Contoh:

Seorang Karyawan dapat menawarkan kepada produser sekotak cokelat untuk musim perayaan akhir tahun karena itu adalah hadiah dengan nilai yang wajar dan ditawarkan kurang dari 200 euro selama periode pertukaran cokelat secara tradisional.

Di sisi lain, Karyawan harus menahan diri untuk tidak menawarkan atau menerima tiket Piala Dunia Sepak Bola di luar negeri karena itu adalah hadiah dengan nilai signifikan yang tidak sesuai dengan profesi dan praktiknya.

2.2. Larangan uang pelicin

Uang pelicin adalah sejumlah uang yang bernilai rendah, yang diminta oleh pejabat publik untuk memperoleh atau mempercepat pelaksanaan tindakan administratif tertentu (pemrosesan dokumen negara, pemberian kuasa atau izin, dll.).

Uang pelicin dilarang keras.

Semua Karyawan berjanji untuk:

- bekerja sama dengan otoritas publik dengan memberikan mereka informasi yang akurat dan lengkap;
- mematuhi peraturan pengadaan publik dan waspada dalam hubungannya dengan pejabat publik atau perwakilan dari suatu administrasi, perwakilan dari otoritas lokal, atau organisasi Prancis atau asing;
- tidak pernah memberikan uang pelicin kepada Pejabat Publik, atau memberikan keuntungan apa pun, langsung atau tidak langsung, yang dengan cara apa pun dapat memengaruhi cara Pejabat menjalankan wewenangnya;

Jika ragu, Karyawan diminta untuk menghubungi manajer lini, Pejabat Kepatuhan, atau Kepala Bagian Hukum untuk meminta pendapat mereka.

2.3. Konflik kepentingan

Konflik kepentingan mengacu pada situasi apa pun ketika kepentingan pribadi seorang Karyawan (atau kepentingan badan hukum atau perorangan yang terkait atau dekat dengannya) bertentangan dengan kepentingan Believe.

Kepentingan pribadi berarti setiap kepentingan yang dapat memengaruhi atau tampak memengaruhi cara Karyawan melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh Believe.

Situasi seperti itu dapat terjadi, misalnya jika seorang Karyawan:

- menegosiasikan sebuah kontrak atas nama Believe ketika ia, atau salah satu kerabatnya, mungkin memiliki kepentingan pribadi secara langsung atau melalui perantara;
- memiliki kepentingan keuangan di Mitra Bisnis atau pesaing Believe;
- melakukan aktivitas berbayar atas nama pihak ketiga, misalnya sebagai karyawan, konsultan, agen, broker, dll.;
- bermitra dengan seseorang yang bekerja dengan pesaing Believe;
- mengadakan kontrak dengan produser tempat pasangan Karyawan bekerja.

Sejauh konflik kepentingan dapat menyembunyikan tindakan korupsi, Karyawan harus waspada terhadap terjadinya situasi konflik kepentingan.

Semua Karyawan berjanji untuk:

- mendukung kepentingan Believe dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, keuangan, atau keluarga, yang dapat menimbulkan keraguan atas integritas mereka;
- memberi tahu manajer lini mereka sesegera mungkin dan secara tertulis jika ada potensi atau terbukti adanya konflik kepentingan;
- tidak berpartisipasi dalam tugas dan penugasan yang dipercayakan kepada mereka dan kemungkinan akan menimbulkan konflik kepentingan, jika ada.

Contoh:

Believe mungkin dapat mempertimbangkan menerima kontrak dengan perusahaan istri salah satu Karyawannya untuk layanan yang terkait dengan penyelenggaraan konser. Namun, dalam konteks tersebut, Karyawan harus menyatakan situasi ini kepada manajer lininya dan menahan diri untuk tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pemilihan penyedia layanan.

Seorang Karyawan tidak boleh mengadakan kontrak dengan perusahaan tempat ia menjadi pemegang saham tanpa melaporkannya kepada Manajemen Believe dan tanpa memperoleh persetujuan sebelumnya.

2.4. Perekrutan

Perekrutan Karyawan baru bisa merupakan tindakan korupsi jika Believe diberikan keuntungan yang tidak semestinya oleh pihak ketiga sebagai imbalan atas perekrutan kandidat tertentu, terutama untuk mendapatkan keuntungan dari kontrak di masa depan atau untuk memengaruhi keputusan administratif.

Oleh karena itu, Believe mengharapkan setiap Karyawan untuk menolak keuntungan yang tidak semestinya (pribadi atau dalam rangka tugas) yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai imbalan perekrutan Karyawan lain.

Contoh:

Seorang Karyawan harus menolak permintaan salah satu kliennya untuk memasukkan putranya ke dalam program magang jika ia tidak memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan memberikan imbalan yang lebih tinggi daripada yang ditentukan dalam jadwal tarif, serta keuntungan seperti akomodasi perusahaan, yang bertentangan dengan janji untuk menandatangani kontrak baru.

2.5. Mitra Bisnis

Risiko korupsi ada saat Believe memiliki hubungan bisnis dengan berbagai Mitra Bisnis dalam kegiatan profesionalnya.

Memang, dalam banyak situasi, sebuah perusahaan mungkin secara hukum bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh Mitra Bisnisnya.

Selama kegiatannya, Karyawan berhubungan dengan banyak Mitra Bisnis, seperti produser, artis beserta agen atau pengacara mereka, distributor, perantara, pemasok, penyedia layanan, pelanggan, dll.

Mereka bertindak dalam konteks ini, sesuai dengan prosedur internal yang berlaku di dalam Believe.

Semua Karyawan berjanji untuk:

- melakukan uji tuntas yang berkaitan dengan integritas Mitra Bisnis yang disesuaikan dan proporsional dengan situasi tertentu (reputasi dan penuntutan yang tertunda atau sebelumnya, keterampilan dan sumber daya di bidang yang diperlukan, hubungan kontrak yang sedang berlangsung atau sebelumnya dengan Pejabat Publik, dll.);

- jika berlaku, pilih Mitra Bisnis secara tidak memihak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan transparan seperti kualitas, layanan, biaya, kepatuhan terhadap peraturan, dll.

Setiap hubungan bisnis dengan Mitra Bisnis harus menghasilkan pembuatan kontrak tertulis dan ditandatangani. Kontrak ini harus berisi klausul yang menegaskan bahwa tekan kontraktor berjanji untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Pembayaran yang dilakukan harus selalu sah, sesuai dengan ketentuan kontrak, sesuai dengan imbalan yang sesuai, dan proporsional dengan layanan yang diberikan.

Dilarang untuk:

- melakukan pembayaran tunai;
- melakukan pembayaran kepada orang selain penandatanganan kontrak;
- melakukan pembayaran tanpa menunjukkan faktur pendukung sesuai dengan isi kontrak.

Semua dokumen khusus untuk bisnis Mitra Bisnis harus disimpan selama hubungan bisnis (kontrak, bukti layanan, faktur, pembayaran, dll.) untuk memfasilitasi verifikasi selanjutnya.

2.6. Melobi

Melobi didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan atau arahan dari pemerintah atau lembaga yang mendukung tujuan tertentu atau hasil yang diharapkan. Secara khusus, ini merupakan kontribusi konstruktif dan transparan untuk pengembangan kebijakan publik tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan perusahaan atau grup. Kontribusi ini bertujuan untuk memperkaya pemikiran para pengambil kebijakan publik.

Terkadang ada garis tipis antara melobi dan korupsi. Bahkan, melobi, meskipun pada prinsipnya diperbolehkan, dapat menjadi salah dan korup ketika orang yang melakukan aktivitas melobi menawarkan atau mengusulkan untuk menawarkan keuntungan kepada Pejabat Publik guna mendorongnya untuk mendukung undang-undang atau kegiatan yang akan menguntungkannya.

Semua Karyawan berjanji untuk:

- menunjukkan integritas, kejujuran intelektual, dan transparansi dalam semua hubungan dengan Pejabat Publik, terlepas dari situasi atau kepentingan yang dipertahankan;
- memberikan informasi yang dapat dipercaya dan objektif, tanpa berusaha memperoleh informasi atau keputusan dengan melakukan tekanan apa pun;
- tidak berusaha untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau keputusan yang menguntungkan;
- memastikan bahwa perwakilan kepentingan melakukan kegiatan mereka sesuai dengan Kode Anti Korupsi ini dan peraturan yang berlaku.

2.7. Donasi, sponsor, dan mensponsori

Believe dapat memberikan donasi, terutama kepada asosiasi, dan dapat melakukan kegiatan patronasi dan sponsor.

Jaminan reputasi badan amal atau badan yang akan disponsori harus diperoleh terlebih dahulu.

Kegiatan donasi, patronasi, dan sponsor ini, dalam beberapa kasus, dapat dilakukan dengan tujuan memperoleh atau menawarkan keuntungan yang tidak semestinya; praktik tersebut dalam hal ini dapat diklasifikasikan sebagai korupsi.

Oleh karena itu, Believe mengharapkan setiap Karyawan mematuhi aturan berikut:

- kegiatan donasi, patronasi, dan sponsor diizinkan, tunduk pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sebagai bagian dari prosedur yang berlaku di dalam Believe;
- kegiatan donasi, patronasi, dan sponsor tidak boleh dilakukan untuk memperoleh atau menawarkan keuntungan yang tidak semestinya atau untuk memengaruhi keputusan secara tidak patut;
- donasi tidak boleh diberikan kepada orang perseorangan atau dibayar tunai.
- kegiatan donasi, patronasi, dan sponsor harus disetujui oleh Manajemen Believe dan harus tunduk pada kontrak patronasi atau sponsor yang sah yang divalidasi sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Believe (validasi setidaknya oleh Manajemen Keuangan dan Departemen Hukum).

2.8. Akuisisi, investasi ekuitas, dan usaha patungan

Dalam akuisisi perusahaan, akuisisi aset yang berkaitan dengan segmen bisnis yang lengkap, akuisisi kepentingan ekuitas, merger, atau pendirian usaha patungan, harus dipastikan bahwa target atau mitra tidak atau tidak pernah berperilaku tidak semestinya sehubungan dengan undang-undang anti korupsi yang berlaku, dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku di bidang ini.

Bahkan, dalam operasi yang disebutkan di atas, tanggung jawab perdata atau pidana Believe dapat terjadi dan dapat menyebabkan konsekuensi komersial, keuangan, dan reputasi yang signifikan.

Oleh karena itu, sudah selayaknya:

- menyertakan komponen anti korupsi dalam proses uji tuntas sebagai bagian dari akuisisi, akuisisi ekuitas, atau usaha patungan;
- memastikan bahwa target atau mitra mematuhi undang-undang anti korupsi yang berlaku.

2.9. Penyimpanan dan keakuratan pembukuan dan catatan

Pembukuan dan catatan mengacu untuk semua catatan akuntansi, keuangan, dan komersial. Hal ini termasuk rekening, korespondensi, ringkasan, pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan bidang akuntansi, keuangan, dan komersial.

Dalam memerangi korupsi, transaksi harus transparan, didokumentasikan secara komprehensif, dan dialokasikan ke rekening yang sesuai secara akurat.

Oleh karena itu, sudah selayaknya:

- bahwa tidak ada entri dalam pembukuan dan catatan Believe yang tidak berdasar, salah, dipalsukan, atau fiktif. Oleh karena itu, dilarang untuk menyembunyikan atau berusaha menyembunyikan pembayaran yang dilakukan atau dikeluarkan atas nama Believe, atau mencoba untuk mengklasifikasi ulang, atau menyembunyikannya dengan cara apa pun;

- bahwa pembukuan dan catatan Believe adalah cerminan yang adil dan akurat dari transaksi yang dilakukan dan harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi dan standar yang berlaku;
- bahwa semua kontrol dan prosedur persetujuan yang ada di dalam Believe diterapkan;
- untuk memelihara dokumentasi yang menunjukkan kelayakan layanan terkait dan pembayaran terkait;
- bahwa semua transaksi keuangan yang disahkan oleh manajer lini mematuhi prosedur pengendalian internal.

3. KEPATUHAN TERHADAP KODE ANTI KORUPSI DAN SANKSI YANG BERLAKU

3.1. Penafsiran dan penerapan Kode Anti Korupsi

Setiap Karyawan harus membaca, memahami, dan mematuhi Kode Anti Korupsi ini.

Kepala Bagian Hukum, Petuhas Kepatuhan, dan Manajer Sumber Daya Manusia Believe akan secara khusus memastikan Karyawan melaksanakan dan menghormatinya.

Setiap Karyawan yang membutuhkan bantuan sehubungan dengan hal-hal yang dibahas dalam Kode Anti Korupsi ini dan, khususnya, jika terjadi kesulitan interpretasi sehubungan dengan penerapannya pada situasi tertentu, dapat menghubungi Pejabat Kepatuhan.

3.2. Hak untuk melapor

Karyawan dan Mitra Bisnis dapat menggunakan sistem peringatan profesional yang dibuat oleh Believe untuk melaporkan dengan cara yang tidak memihak dan dengan itikad baik adanya perilaku atau situasi yang bertentangan dengan Kode Anti Korupsi ini yang telah mereka ketahui secara pribadi, sejauh cenderung mencirikan tindakan korupsi atau perdagangan pengaruh atau melanggar hukum di negara tempat Believe beroperasi.

Meskipun melaporkan kekhawatiran kepada manajer lini masih dimungkinkan, sistem peringatan profesional memberikan perlindungan yang lebih baik kepada karyawan jika laporan diterbitkan, termasuk jaminan kerahasiaan.

Namun, penggunaannya bersifat opsional.

Dalam praktiknya, setiap Karyawan dapat mengirimkan laporannya, bahkan jika itu hanya kecurigaan, sesuai dengan prosedur yang berkaitan dengan sistem peringatan profesional Believe.

Tidak ada tindakan disiplin yang dapat diberlakukan terhadap Karyawan yang dengan itikad baik dan tanpa pamrih melaporkan pelanggaran atau kecurigaan pelanggaran aturan Kode Anti Korupsi ini.

Prosedur ini tersedia kapan saja di Believe Insider.

Namun, di negara-negara tertentu, ada kewajiban hukum untuk melaporkan kegiatan korupsi kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab. Misalnya, seseorang yang mengetahui tentang pejabat publik yang terlibat dalam kegiatan korupsi mungkin diwajibkan untuk melaporkan hal ini dan segera memberikan informasi kepada polisi dengan sanksi.

3.3. Sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Anti Korupsi

Kegagalan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Kode Anti Korupsi ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, tidak hanya bagi Believe, tetapi juga bagi Karyawan dan Mitra Bisnis.

Bagi Believe, setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam Kode Anti Korupsi ini tidak hanya dapat merusak reputasinya dan memengaruhi aktivitasnya, tetapi juga membuatnya harus memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan dan tuntutan pidana.

Perlu diingat bahwa Kode Anti Korupsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Internal Believe. Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan tindakan disiplin berdasarkan kondisi yang ditetapkan dalam Peraturan Internal tersebut.

Oleh karena itu, bagi Karyawan, jika dibenarkan oleh keadaan, pelanggaran aturan anti korupsi yang diatur dalam Kode Anti Korupsi dapat menyebabkan mereka terkena sanksi disiplin hingga dan termasuk pemutusan kontrak kerja berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Internal, serta proses hukum pribadi, pidana, dan/atau perdata.